

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667789/2022**

Revisi ke 01
Tanggal : 15 Desember 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : (32) | KEPULAUAN RIAU |
| 4. Kode/Nama Satker | : (667789) | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU |
| Sebesar | : Rp. | 977.268.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	977.268.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN TANJUNG PINANG | (009) Rp. | 977.268.000 |
|------------------------|-----------|-------------|

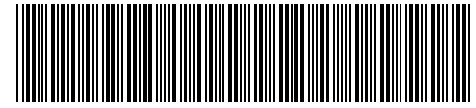
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022



DS:4270-3990-0033-4070

Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	141.220.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	141.220.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	836.048.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	836.048.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



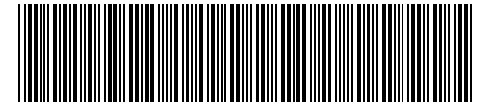
DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			141.220.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			141.220.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	13.316.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	13.316.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	127.904.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	127.904.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			836.048.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			836.048.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17,00	Kelompok Masyarakat	130.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	15,00	Kelompok Masyarakat	102.516.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	27.484.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6,00	Lembaga	91.010.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	6,00	Lembaga	91.010.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan	95.018.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	76.467.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	Layanan	18.551.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		57,00	Orang	456.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	57,00	Orang/Kasus	456.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		6,00	Kelompok Masyarakat	64.020.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	6,00	Kegiatan	64.020.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

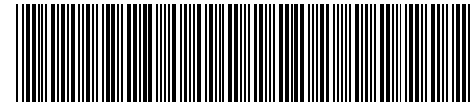
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022

I B. SUMBER DANA



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
 Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

		Rp.	977.268.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2022					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	977.268.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	-	965.268	12.000	-	-	977.268		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	141.220	-	-	-	141.220		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	141.220	-	-	-	141.220		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	13.316	-	-	-	13.316	32 . 52	
01	RM	-	13.316	-	-	-	13.316	009	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	127.904	-	-	-	127.904	32 . 52	
01	RM	-	127.904	-	-	-	127.904	009@	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	824.048	12.000	-	-	836.048		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	824.048	12.000	-	-	836.048		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	130.000	-	-	-	130.000	32 . 52	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	130.000	-	-	-	130.000	009@	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	91.010	-	-	-	91.010	32 . 52	
01 RM		-	91.010	-	-	-	91.010	009	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	83.018	12.000	-	-	95.018	32 . 52	
01 RM		-	83.018	12.000	-	-	95.018	009	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	456.000	-	-	-	456.000	32 . 52	
01 RM		-	456.000	-	-	-	456.000	009@	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (32.52 KEPULAUAN RIAU / KOTA TANJUNG PINANG)	-	64.020	-	-	-	64.020	32 . 52	
01 RM		-	64.020	-	-	-	64.020	009@	
JUMLAH		-	965.268	12.000	-	-	977.268		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (32) KEPULAUAN RIAU
Kode>Nama Satker : (667789) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.225	51.212	176.269	62.931	81.648	100.236	132.567	65.094	89.322	121.492	67.597	14.675	977.268
		BELANJA BARANG	14.225	49.599	168.507	62.737	81.454	100.042	130.816	64.803	89.322	121.492	67.597	14.675	965.268
		BELANJA MODAL	0	1.613	7.762	194	194	194	1.751	291	0	0	0	0	12.000
013.10.BB.5256		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.185	13.032	17.663	1.200	2.724	32.244	15.616	13.314	13.102	24.138	3.327	675	141.220
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.185	13.032	17.663	1.200	2.724	32.244	15.616	13.314	13.102	24.138	3.327	675	141.220
013.10.BF.4841		Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	10.040	38.180	158.606	61.731	78.924	67.992	116.951	51.780	76.220	97.354	64.270	14.000	836.048
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	10.040	36.567	150.844	61.537	78.730	67.798	115.200	51.489	76.220	97.354	64.270	14.000	824.048
		53 BELANJA MODAL	0	1.613	7.762	194	194	194	1.751	291	0	0	0	0	12.000

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
IV A. B L O K I R**



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667789] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

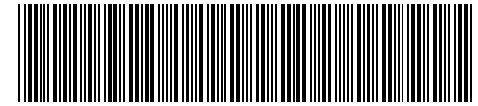
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU		Disposisi: Automatic Adjustment
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 252.060	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	52 Belanja Barang Rp. 252.060		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.486
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi		Automatic adjustment
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan
5256.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga		Disposisi: Automatic Adjustment
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.688		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 171.000
	Automatic Adjustment		Automatic adjustment
	Disposisi: Automatic Adjustment	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.470	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Automatic Adjustment		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.300
	Disposisi: Automatic Adjustment		Automatic adjustment
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Automatic Adjustment
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.646		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		
4841.BDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.270		
	Automatic adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.200		
	Automatic adjustment		

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667789/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:4270-3990-0033-4070

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [32] KEPULAUAN RIAU
Kode dan Nama Satker : [667789] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001